

**HAK ANAK ANGKAT DARI ORANG TUA ANGKAT DALAM
HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Pengadilan Agama Medan)

TESIS

Oleh :

TRESNA HARIADI
NIM : 027011065



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2004**

Tresna Hariadi : Hak Anak Angkat Dari Orang Tua Angkat Dalam Hukum Islam (Studi Pada..., 2004

USU Repository © 2007

HAK ANAK ANGKAT DARI ORANG TUA ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM
(Studi path Pengadilan Agama Medan)

T r e s n a H a r i a d i ¹
H.M.Hasballah Thaib²
Runtung Sitepu³
Svahril Sayan³

INTISARI

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah membawa khasanah baru dalam fiqih Islam di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah pengangkatan anak. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 tentang wasiat wajibah merupakan jembatan yang menutupi ketimpangan yang terjadi antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak terjadi saling mewarisi antara keduanya karena adanya larangan pengakuan terhadap anak angkat dalam hukum Islam sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat (4), dan (5).

Dan kenyataan tersebut di atas perlu diadakan penelitian guna mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan bagi Pengadilan Agama Medan dalam memberikan harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat, untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Pengadilan Agama Medan dalam menentukan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya serta untuk mengetahui ukuran keadilan yang diterapkan Pengadilan Agama Medan untuk menentukan bagian anak angkat.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis Empiris, dimana penelitian ini disamping mempergunakan bahan-bahan perpustakaan, putusan Pengadilan Agama Medan, juga meminta informasi dari 4 (empat) orang Hakim, 1 (satu) orang Panitera, 4 (empat) orang Pengacara, 3 (tiga) orang Pengurus Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dan 5 (lima) orang Ulama yang berada di Kota Medan perihal yang berhubungan dengan judul tesis ini.

Dan hasil penelitian 17 (tujuh belas) orang informan dan 1 (satu) Putusan Pengadilan Agama mengenai waris mewaris yang di dalamnya terdapat anak angkat diperoleh jawaban bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Pengadilan Agama

1. Mahasiswa Magister Kenotariatan
2. Guru Besar/Dosen Program Pasca Sarjana USU
3. Dosen/Ketua Program Magister Kenotariatan USU

Medan dalam memberikan harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat, adalah anak angkat tersebut telah diangkat berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku II Bab I Pasal 171 huruf (h), dan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan sepanjang pengangkatan anak tersebut telah diakui sebagai anak angkat oleh orang tua angkat disertai dengan adanya saksi-saksi. Pandangan hukum Islam dan Pengadilan Agama Medan dalam menentukan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya adalah Pewarisan hukum Islam tidak memberikan hak kepada anak angkat atas harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Pemberian dari orang tua angkat kepada anak angkat hanya boleh dilakukan melalui hibah pada saat hidupnya orang tua angkat atau dengan jalan memberikan wasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat mendapat bagian harta peninggalan maksimal 1/3 bagian sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal anak angkat telah mendapatkan bagian harta dari orang tua angkat melalui hibah atau wasiat maka bagian yang telah didapat tidak boleh melebihi 1/3 bagian harta peninggalan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 201 dan 210 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap anak angkat tersebut tidak lagi mendapatkan bagian wasiat wajibah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum, Ukuran keadilan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Medan dalam menentukan bagian anak angkat adalah apabila hakim dalam memutus perkara anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat telah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada pemerintah, agar pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada yang ingin melakukan pengangkatan anak, agar dibuatkan putusan pengangkatan anak oleh Pengadilan guna menjamin hak dan kepentingan dari anak angkat tersebut dikemudian hari sepeninggal orang tua angkatnya. Menyarankan kepada pemerintah untuk menyempurnakan lagi ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dengan memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk keluar dari ketentuan Pasal 209 apabila anak angkat tersebut baik semasa hidup maupun setelah meninggal orang tua angkat melakukan perbuatan yang merugikan orang tua angkat atau saudara angkat secara langsung atau tidak langsung atas harta milik orang tua angkat. Serta menyarankan kepada pemerintah segera merevisi Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tersebut dan membuat peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin rasa keadilan sesuai dengan syariah Islam yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci : - Hak Mak Angkat
- Harta Peninggalan Orang Tua Angkat
- Hukum Islam

THE RIGHTS OF AN ADOPTED CHILD FROM THE ADOPTING PARENTS IN
ISLAMIC LAW
(The Study at Medan Religious Court)

T r e s n a H a r i a d i ¹
H.M.Hasballah Thaib²
Runtung Sitepu³
Svahril Sayan³

ABSTRACT

The Presidential Directive No. I of 1991 dated 10th June, 1991 on Islamic Law Compilation has brought a new treasury in Islamic fiqh (the study of law pertaining to ritual obligation) in Indonesia, especially concerning the matter of adopting a child. The presence of the Islamic Law Compilation as regulated in Article 209 on the last will and testament is a bridge which cover unbalance between an adopted child and adopting parents in which there is not any last will and testament because of the prohibition of acknowledging an adopted child in the Islamic law as mentioned in the letter of al-Ahzab, paragraphs 4 and 5.

From this fact, it is necessary to conduct a research to know the principle of the consideration for Medan Religious Court in giving heritage of adopting parents to an adopted child, to know the view of the Islamic law and Medan Religious Court in determining the rights of an adopted child on the heritage of adopting parents, and to know the measurement of justice applied by Medan Religious Court to determine the allotment of the adopted child.

The method applied in this research is the empirical, juridical one, it means that this research, besides using library sources, the decisions of Medan Religious Court, also asks for information from 4 (four) judges, 1 (one) clerk of the court, 4 (four) attorneys, 3 (three) members of the Council of Religious Scholars of North Sumatra and 5 (five) Muslim religious leader in Medan concerning the title of this thesis.

From the results of the research, 17 (seventeen) informant and 1 (one) Decision of Court related to heritage which included adopted children, it was gotten the answers that the principles of the consideration of Medan Religious Court in giving heritage of the adopting parents to the adopted children was that the adopted children have been adopted based on the decisions of the court as

1. Student of Postgraduate Notary Program
2. Professor/Lecturer of Postgraduate Program, University of North Sumatra
3. Lecturer/Head of Postgraduate Notary Program, University of North Sumatra

regulated in Book II Article I Paragraph 171 letter (h), and the adoption of the children without any decision of the court as long as the adoption has been acknowledged as adopted children by adopting parents which is followed by any sanctions. The view of the Islamic law and Medan Religious Court in deciding the rights of adopted child and the heritage of adopting parents is that the Islamic Law on Heritage does not give any rights over the heritage of adopting parents to any adopted child. The gift of adopting parents to adopted child is only in the form of grant when they are still alive or by giving last will and testament. According to the Islamic Law Compilation, adopted child maximally gets 1/3 of the heritage in accordance with the provision of Article 209 of the Islamic Law Compilation. In the case that an adopted child has accepted the allotment of the heritage of his/her adopting parents in the form of grant or last will and testament, then the allotment he/she has gotten should not exceed 1/3 of the heritage as mentioned in Article 201 and 210 of the Islamic Law Compilation, the adopted child does not get any more allotment of the heritage as mentioned in Article 209 of the Islamic Law Compilation. The measurement of the justice applied by Medan Religious Court in deciding the allotment of an adopted child is that if the judge in deciding the case of the adopted child over the heritage of the adopting parents is in accordance with the provisions mentioned in the Islamic Law Compilation.

From the results of this research, the researcher suggests the government that the government gives the information to the society, especially to the persons who want to adopt a child in order that the court makes the decision of adoption to secure the rights and interests of the adopted child in the future after the death of the adopting parents. It is suggested that the government complete the provision of Article 209 of the Islamic Law Compilation, by giving the authority to the court of justice to be out of the provision of Article 209 if the adopted child during the life or after the death of the adopting parents do harm, directly or indirectly, to the adopted parents or brothers and sisters over the heritage of the adopting parents. It is also suggested the government to revise the Presidential Directive No. 1 of 1991 and make the regulations which more secure justice in accordance with Islamic syariaah (law) which has been established in Koran and the hadist (traditional collection of stories relating words or deeds of Muhammad; the chief source of guidance for understanding religious questions) of the prophet Mohammad.

Key words:

- The rights of Adopted Child
- The heritage of the Adopting Parents
- Islamic Law